

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang (Yusuf, 2011).

Hutan Tanaman Industri (HTI) dibangun untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya. Melalui kebijakan pemerintah dalam pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Hak Pemugutan Hasil Hutan (HPHH) maka dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan devisa negara, menyerap tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pembangunan HTI pertama kali dicanangkan di Indonesia pada tahun 1985 dengan tujuan untuk memenuhi pasokan kayu industri pengolahan bubur kayu (pulp) dan kertas (Kartodihardjo, 2000). Berdasarkan penjabaran dari Direktorat Bina Pembangunan Hutan Tanaman (Tahun 2009) adapun tujuan dari pembangunan HTI adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan bahan baku industri berupa hasil hutan kayu.
2. Meningkatkan produktivitas sebagai hutan produksi.

3. Menyediakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan nasional.
5. Memberdayakan masyarakat khususnya warga sekitar hutan supaya mendapatkan kesejahteraan ekonomi.
6. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
7. Meningkatkan persaingan bahan baku industri dari hutan, seperti pulp, kayu lapis, kertas, penggergajian, mebel, kayu pertukangan, dan sebagainya.
8. Mendorong hasil industri hutan untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri serta ekspor ke luar negeri.
9. Meningkatkan devisa melalui kegiatan ekspor bahan baku maupun produk jadi.

Perkembangan dan penyebaran pembangunan HTI sebagian besar berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera, Provinsi Jambi termasuk daerah yang memiliki Kawasan Hutan Produksi yang cukup luas 1.222.077 Ha, dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan HTI yang mendapatkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebanyak 19 perusahaan dengan total luas areal kelola 693.079 Ha. Penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk HTI sebesar 56,71 %, lebih dari setengah luasan Hutan Produksi yang ada di Provinsi Jambi yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal Perusahaan HTI Di Provinsi Jambi

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	PT. Wana Perintis	6.900	0,96
2	PT. Mugitriman International	37.500	5,41
3	PT. Jebus Maju	15.012	2,17
4	PT. Limbah Kayu Utama	19.300	2,78
5	PT. Wanakasita Nusantara	8.784	1,27
6	PT. Rimba Hutani Mas	51.260	7,39
7	PT. Agronusa Alam	22.525	3,25
8	PT. Alam Lestari Nusantara	10.785	1,56
9	PT. Samhutani	35.955	5,19
10	PT. Lestari Asri Jaya	61.495	8,87
11	PT. Rimba Tanaman Indonesia	8.155	1,18
12	PT. Hijau Artha Nusa	32.620	4,71
13	PT. Gading Karya Makmur	27.703	3,99
14	PT. Malaka Agro Perkasa	24.485	3,53
15	PT. Delonix Lestari Jaya	5.050	0,73
16	PT. Wana Mukti Wisesa	9.264	1,34
17	PT. Arangan Hutan Lestari	9.400	1,36
18	PT. Wirakarya Sakti	287.116	41,43
19	PT. Tebo Multi Agro	19.770	2,85
Total		693.079	100,00

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022

HTI merupakan hutan buatan atau *artificial forest/man-made forest* dengan struktur tegakan membentuk hutan seumur. Pembangunan HTI dengan sistem silvikultur maka diharapkan dapat menyelamatkan hutan alam dari kerusakan. Hutan yang rusak, yang telah menjadi belukar dan padang ilalang, tidak lagi produktif diolah menjadi hutan produktif yang berkesinambungan dan banyak manfaatnya. Karena HTI merupakan potensi kekayaan alam yang dapat diperbaharui, dimanfaatkan secara maksimal dan lestari bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan untuk kesejahteraan penduduk. Pembangunan HTI mempunyai 3 sasaran utama yang dapat dicapai yakni sasaran sosial, ekonomi dan ekologi (Iskandar, 2005). Berdasarkan sasarannya, maka pembangunan HTI tentunya harus memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan

lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam pengelolaan HTI yang memperhatikan dan menerapkan kelestarian produksi, kelestarian sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan dan pengelolaan HTI dalam jangka panjang pasti memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung. Secara harfiah istilah dampak atau *impact* mengandung pengertian hubungan yang bersifat kausalitas (sebab akibat). Dampak sebagai suatu gejala berupa perubahan yang cepat dalam dasar-dasar ekonomi, kependudukan dan struktur sosial yang biasanya menimpa suatu wilayah disebabkan adanya proyek atau pembangunan. Menurut Hadi (1995), dampak adalah suatu perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang disebabkan oleh aktifitas pembangunan proyek, program atau kebijaksanaan yang diterapkan pada masyarakat dan mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem di dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang secara fisik dan historis merupakan pihak yang berkepentingan dengan sumber daya hutan, perlu memperoleh hak prioritas dalam berbagai peluang usaha sektor kehutanan, termasuk dalam usaha Hutan Tanaman Industri. Diyakini bahwa dengan segala keterbatasan masyarakat saat ini, maka tidak mungkin mampu melaksanakan pengelolaan sumberdaya hutan yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu pemberian prioritas kepada masyarakat tersebut tidak dianggap sebagai penghalang bagi investor besar dari luar. Bahkan sebaliknya upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dalam sektor kehutanan sangat memerlukan campur tangan pengusaha besar dari luar lingkungan hutan.

PT. Wirakarya Sakti merupakan salah satu perusahaan besar dari grup Sinar Mas yang mengelola usaha dibidang HTI sejak tahun 1989 yang dimulai dengan memperoleh ijin pembuatan tanaman percobaan sampai kemudian diberi hak konsesi. Lokasi usaha PT. Wirakarya Sakti mencakup dan tersebar di 5 kabupaten Propinsi Jambi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi dan Tebo (Lampiran 1), dengan sebaran wilayah kerja yang terbagi menjadi 8 distrik yaitu:

Tabel 2. Sebaran Areal Kerja HTI PT. Wirakarya Sakti

No	Distrik	Luas (Ha)	Wilayah Administratif
1	Distrik I	46.585	Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Muaro Jambi
2	Distrik II	33.328	Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Muaro Jambi
3	Distrik III	39.251	Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Batanghari
4	Distrik IV	33.157	Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Batanghari
5	Distrik V	37.827	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6	Distrik VI	21.262	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7	Distrik VII	34.925	Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Muaro Jambi
8	Distrik VIII	40.832	Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Batanghari Kabupaten Tebo
TOTAL		287.116	

Sumber: PT. WKS Tahun 2023

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk areal kerja konsesi PT Wirakarya Sakti berdasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu SK No. 1141/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tertanggal 17 November 2021 dan penetapan areal kerja sesuai Surat Keputusan No. SK 55/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2021 tanggal 18 Februari 2021 seluas

287.116,11 Ha. Adapun tujuan dari pembangunan dan pengelolaan HTI PT. Wirakarya Sakti yaitu rehabilitasi sumberdaya hutan untuk mendukung pasokan bahan baku industri pulp, sehingga jenis tanaman yang dipilih dan ditanam adalah tanaman yang dapat menjadi bahan baku pulp (fiber). Kesesuaian lahan diperoleh dengan kajian silang antara jenis tanaman dan kelas lahan (*species sitematching*). Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, maka jenis tanaman pokok yang dikembangkan saat ini adalah *Eucalyptus sp.* untuk daerah kering, dan *Acacia crassicarpa* untuk daerah basah (Ringkasan Publik PT. WKS, 2023).

Wilayah pembangunan dan pengelolaan HTI PT. Wirakarya Sakti yang pertama kali dibuka adalah areal kerja Distrik I seluas 46.585 Ha, merupakan areal pengelolaan terluas yang saat ini sudah memasuki rotasi/daur ke-7 (rata-rata per rotasi/daur selama 4 – 5 tahun) dengan umur/masa pengelolaan sudah mencapai 30 tahun. Letak areal Distrik I ini juga berdekatan dengan lokasi pabrik pulp PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (PT. LPPPI), yang suplai bahan baku kayunya ke pabrik dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat. Kedua industri ini, yaitu industri HTI terintegrasi secara vertikal dengan industri pulp dan kertas.

Kawasan hutan Distrik I berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, tercakup dalam 6 kecamatan dan berbatasan langsung dengan 15 desa sekitar kawasan hutan yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Wilayah Administratif Areal Kerja HTI PT. WKS Distrik I

Kabupaten	Luas (Ha)	Kecamatan	Desa	Jarak Ke Desa (Km)		
Tanjung Jabung Barat	46.065	Bram Itam	Bram Itam Kanan	20		
			Bram Itam Kiri	23		
		Muara Papalik	Lubuk Sebontan	30		
			Dusun Mudo	33		
			Tungkal Ulu	Kuala Dasal	23	
		Betara	Pematang Lumut	28		
			Mendala Jaya	37		
			Pematang Buluh	23		
			Terjun Gajah	25		
			Serdang Jaya	35		
			Tebing Tinggi	Purwodadi	15	
				Delima	17	
		Muaro Jambi	519	Sekernan	Dataran Kempas	13
					Sungai Keruh	11
Suko Awin Jaya	32					

Sumber: PT. WKS Tahun 2023

Tabel 3 menunjukkan adanya 4 desa terdekat dengan areal kerja Distrik I dengan jarak rata-rata sejauh 14 Km, yaitu Desa Purwodadi, Delima, Dataran Kempas dan Sungai Keruh yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tebing Tinggi (Lampiran 3). Desa-desa sekitar Kawasan HTI ini mempunyai aktivitas dan interaksi yang cukup tinggi dengan kegiatan HTI perusahaan dan akses paling dekat sehingga berpotensi terkena dampak yang cukup besar serta merupakan desa yang termasuk dalam desa binaan oleh Distrik I.

Secara historikal masyarakat Desa Purwodadi, Delima, Dataran Kempas dan Sungai Keruh pada awalnya merupakan warga transmigrasi dari pulau Jawa pada tahun 1985 yang datang dan menetap di Desa Purwodadi, kemudian pada tahun 2012 terjadi pemekaran desa maka terbentuklah Desa Delima, Dataran Kempas dan Sungai Keruh. Wilayah desa ini mempunyai topografi yang datar, berupa hamparan dengan ketinggian 36 M dari permukaan laut. Sumber utama kehidupan

masyarakatnya bergantung dari bidang pertanian. Mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar dari berkebun sawit, penanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan dan biofarmaka), peternakan, dan bekerja sebagai buruh di lingkungan kerja HTI dan perkebunan kelapa sawit. Infrastruktur dan transportasi antar desa melalui darat, khusus desa Purwodadi dan Dataran Kempas jalan utama desa sudah diaspal/cor sedangkan desa lainnya hanya jalan tanah yang diperkeras. Fasilitas umum yang sudah ada seperti pasar, tempat ibadah, pelayanan kesehatan dan sekolah dengan jumlah dan kualitas yang masih sangat kurang (Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Angka, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/Menhut-II/2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, telah diatur bahwa setiap perusahaan wajib untuk melaksanakan kegiatan kelestarian fungsi sosial ekonomi terhadap masyarakat dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memperhatikan kemampuan dan keunggulan daerahnya. Kegiatan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi budaya setempat, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya dukung yang dimiliki oleh masyarakat. Melindungi dan keberpihakan kepada masyarakat untuk mencegah dampak persaingan yang tidak sehat.

Pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa sekitar kawasan hutan selalu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa penyebaran

kemampuan, keterampilan maupun kekayaan pada berbagai lapisan masyarakat belum dapat dirasakan semua lapisan masyarakat. Masyarakat desa makin tertinggal baik dibidang pendidikan, kesehatan, pemukiman dan ketersediaan fasilitas umum. Masyarakat kian terpinggirkan dengan atribut kemakmuran semu, sehingga perlu didorong untuk memperbaiki nasibnya dalam mencapai tingkat kemakmuran. Seperti yang dikemukakan oleh Prayitno dalam Arifin (2002) bahwa belum semua hasil-hasil kemajuan pembangunan dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, terlebih-lebih golongan miskin sebagai mana diketahui kemiskinan yang terbesar berada di wilayah pedesaan.

Hubungan timbal balik antara masyarakat dengan sumberdaya hutan sebelum adanya kawasan HTI merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi, maka perlu diupayakan suatu model dan strategi pembangunan kehutanan yang dipadukan dengan upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat ini pada umumnya masih rendah. Pada masa sekarang pengelolaan hutan harus menerapkan strategi kehutanan sosial yaitu perencanaan bottom up yang bertitik tolak kepada kondisi obyektif. Upaya-upaya pengelolaan hutan yang dilakukan harus lebih diorientasikan pada pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang, merata dan berkelanjutan yang dapat membentuk masyarakat desa mandiri dalam membangun wilayahnya.

Ukuran keberhasilan kegiatan pengelolaan HTI yang utama adalah kelangsungan usaha kehutanan dengan pengelolaan HTI yang dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi dan

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian masyarakat disekitar hutan tidak kehilangan akses dan dapat memperoleh manfaat yang seimbang.

Untuk mendapatkan kesempatan dan peluang yang ingin dicapai dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat desa sekitar kawasan hutan karena fokus setiap usaha umumnya hanya berorientasi pada kemajuan serta keuntungan bagi perusahaan semata, kurang memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya, menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Hutan Tanaman Industri PT. Wirakarya Sakti Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Binaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**.

1.2. Perumusan Masalah

Pada saat ini pilihan bentuk pengelolaan sumber daya hutan terfokus pada strategi kehutanan sosial dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai macam hasil hutan, memecahkan problem lokal dan sejauh mungkin berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui partisipasi penduduk yang efektif, khususnya mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Pengelolaan HTI yang dilaksanakan oleh PT. Wirakarya Sakti adalah pengelolaan hutan dengan memperhatikan Pengelolaan Hutan Secara Lestari yaitu terdapatnya aspek kelestarian hutan, kelestarian lingkungan, kelestarian usaha dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

PT. Wirakarya Sakti sebagai perusahaan HTI mengelola areal seluas 287.116 Ha, yaitu sebesar 41,43 % dari total areal HTI yang ada di Provinsi Jambi.

Kegiatan operasional HTI PT. Wirakarya Sakti yang terbesar berada di Distrik I, yang sudah memasuki rotasi/daur ke 7 dengan masa pengelolaan lebih dari 30 tahun. Dalam menjalankan roda usahanya manajemen HTI Distrik I melakukan interaksi dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat desa terdekat yang ada di sekitar kawasan terutama Desa Purwodadi, Delima, Dataran Kempas dan Sungai Keruh yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.

Operasional HTI Distrik I melakukan kegiatan penanaman jenis *Eucalyptus sp* dan *Acacia crassicarpa* yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik pulp. Areal kerja HTI Distrik I seluas 46.585 Ha, dengan luasan kerja yang cukup besar ini pasti membutuhkan bantuan, peran serta dan keterlibatan masyarakat desa. Adanya hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan serta ketersediaan fasilitas umum yang ada di desa.

Desa Purwodadi, Delima, Dataran Kempas dan Sungai Keruh merupakan desa binaan Distrik I. Terbukanya akses antar desa sebagai wilayah terpencil membuka kesempatan terjalinnya komunikasi dengan wilayah lain. Diversifikasi kegiatan pengelolaan HTI dan pemanfaatan secara optimal potensi-potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam bentuk usaha produktif, bertujuan untuk melibatkan penduduk agar tidak kehilangan akses dan dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari sumber daya hutan, masyarakat tetap dapat bekerja sebagai buruh, adanya kesempatan berusaha dan mendapatkan hasil dari usaha berbagai macam komoditi antara lain dari hasil kehutanan, pertanian, dan peternakan.

Pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat bertujuan menjadikan masyarakat desa yang berpartisipasi aktif, dan mampu mandiri dalam membangun wilayah sesuai karakteristik, kemampuan, daya dukung dan budaya di desa masing-masing.

Pertanyaan yang dapat diajukan dalam rumusan masalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang dilaksanakan oleh PT. Wirakarya Sakti Distrik I?
2. Bagaimana kondisi sosial dan tingkat ekonomi masyarakat desa binaan Hutan Tanaman Industri PT. Wirakarya Sakti Distrik I?
3. Bagaimana dampak pengelolaan Hutan Tanaman Industri PT. Wirakarya Sakti Distrik I terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa binaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang dilaksanakan oleh PT. Wirakarya Sakti Distrik I.
2. Menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat desa binaan Hutan Tanaman Industri PT. Wirakarya Sakti Distrik I.
3. Menganalisis dampak pengelolaan Hutan Tanaman Industri PT. Wirakarya Sakti Distrik I terhadap perubahan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat desa binaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan lebih bermakna bila berguna baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi, evaluasi, gambaran dan pembekalan mengenai dampak Pengelolaan HTI terhadap sosial ekonomi pada masyarakat desa sekitar kawasan hutan. Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti diantaranya adalah:

1. Bagi peneliti, semoga semakin memperluas wawasan berfikir mengenai masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang dipelajari.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan gambaran aktual kondisi sosial ekonomi di desanya untuk dasar pengembangan dan pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik, daya dukung dan kemampuan desa masing-masing.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan perusahaan, sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan dan mengevaluasi tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa binaan yang berinteraksi langsung dengan kegiatan pengelolaan HTI PT. Wirakarya Sakti Distrik I.